BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Pembalakan Liar
Edisi : 23 APRIL 2008
Hari : RABU
Hal. : 23

Pembalakan Liar Terus Berlangsung

Kesepakatan 18 Menteri Tak Bisa Diterapkan

Pontianak, Kompas - Pembalakan liar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terus berlangsung meski kepolisian daerah di kedua provinsi itu telah menyita sekitar 30.000 potong kayu ilegal. Di Kabupaten Ketapang, penertiban baru menjangkau separuh dari empat jalur rawan pembalakan liar.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Barat Sunarno, Selasa (22/4) di Pontianak, mengemukakan, selain jalur pembalakan liar di Sungai Pawan dan Sungai Labai yang sudah ditangani polisi, masih ada dua jalur yang belum tersentuh, yakni jalur Sungai Matan dan Kendawangan.

Sejauh ini, tiga pelaku pembalakan liar di Sungai Labai, AL, AN, dan AH, masih buron. Begitu juga pelaku pembalakan liar di Sungai Pawan, AS dan AU.

Selasa pagi, Kepala Polda Kalbar Brigadir Jenderal (Pol) Zainal Abidin Ishak memimpin serah terima jabatan Kepala Polres Ketapang dari Ajun Komisaris Besar Gustav Leo kepada Ajun Komisaris Besar Karyoto. Gustav dimutasi menjadi Kepala Subbidang Kemitraan Luar Negeri Divisi Humas Mabes Polri. Adapun Karyoto sebelumnya adalah penyidik yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari Palangkaraya dilaporkan, Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (Sporc) Brigade Kalaweit Kalteng juga menggelar operasi penertiban pembalakan liar dan banshaw (kilang penggergajian kayu) tanpa izin. Operasi berlangsung pada 21-30 April.

Pada Selasa kemarin, tim Sporc dibantu Polda Kalteng tiba di Kabupaten Pulang Pisau. Komandan Sporc Brigade Kalaweit Kalteng Irmansyah yang dihubungi dari Palangkaraya menyatakan, pihaknya memburu HM, pemilik kilang penggergajian di Kabupaten Pulang Pisau. HM terkait kasus pembalakan liar dan pemilikan bansaw ilegal saat operasi gabungan pada 7-12 April. Di kilang milik HM, petugas menyita gergaji mesin dan 10 meter kubik kayu olahan.

Kesepakatan 18 menteri

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Tim Penanggulangan Pembalakan Liar yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mencari jalan keluar guna menyelesaikan sengketa pembalakan liar di Provinsi Riau. Hal itu akibat tak terlaksananya kesepakatan 18 menteri (di bawah Menko Polhukam) yang dibuat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Polda Riau dan Menteri Kehutanan.

Hal itu dikemukakan Endro Siswoko, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan wilayah Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa.

Kesepakatan 18 menteri mengizinkan kayu yang sudah ditebang dipakai oleh perusahaan pemilik dengan uang jaminan. Namun, menurut Polda Riau, kesepakatan itu bukan landasan hukum bagi penggunaan kayu hasil pembalakan liar. (CAS/WHY/SAH)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup